**PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
(Studi di Kota Pontianak)**

**OLEH:
GRACE KELLY SIHOMBING, S.H
NPM.A2021151029**

Abstrak

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) merupakan solusi dari Undang-Undang Hak Cipta 2014 terhadap pencipta yang mengalami kendala dalam pengurusan/pengelolaan hak ekonomi yang diterima pencipta dari komersialisasi ciptaannya. LMK Nasional membentuk sebuah lembaga Koordinator Pelaksanaan Penarikan dan Pendistribusian Royalti yaitu KP3R bertugas menarik, menghimpun dan memberikan royalti kepada yang mempunyai hak. KP3R melaksanakan beberapa hal mengenai tugas LMK. Dimana Peran dan fungsi KP3R dalam mengelola lisensi Hak Cipta dan Hak Terkait untuk penggunaan lagu/karya rekaman musik untuk keperluan komersial merupakan aliansi dari LMK yang telah mendapatkan izin operasional yang mana seharusnya peran dan fungsi tersebut berdasarkan amanat Undang-Undang Hak Cipta dilaksanakan oleh LMK. Sehingga timbul permasalahan terkait pelaksanaan peran lembaga tersebut terkait pemungutan royalti.

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-terapan, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum yaitu terkait proses pengumpulan serta pendistribusian royalti oleh LMK. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Data primer diperoleh langsung dari observasi dilapangan melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian pengelola rumah bernyanyi banyak yang tidak mengetahui LMK. Sehingga banyak rumah bernyanyi yang tidak berkerjasama dengan LMK. Dalam penelitian para pihak rumah bernyanyi lebih mengenal lembaga YKCI, WAMI, RAI dibanding KP3R (WAMI). Yang mana KP3R merupakan pelaksana pemungutan royalti yang diamanatkan oleh LMK. Kepastian aturan hukum mengenai LMK dan KP3R menimbulkan dualisme badan hukum yang berwenang melakukan penarikan royalti. Dalam melakukan penarikan royalti KP3R menetapkan nilai tarif tinggi tanpa melakukan penggolongan daerah sehingga menimbulkan keberatan bagi rumah bernyanyi. Alasan tersebut mengakibatkan rumah bernyanyi(tempat karaoke) belum bekerjasama dengan LMK. Untuk itu diperlukan sosialisasi terkait LMK dan KP3R serta peninjauan kembali mengenai tarif yang ditetapkan KP3R, agar pelaksanaan peran dalam pemungutan dan pendistribusian royalti bagi beberapa rumah bernyanyi dapat efektif dan nyata.

Abstract

The Collective Management Institution (LMK) is the solution of the Copyright Act 2014 against the creators who are experiencing difficulties in managing / managing the economic rights that the creator receives from the commercialization of his creations. National LMK established an agency Coordinator of the Drawing and Distribution Implementation of Royalties, namely KP3R duty to collect, collect and give royalties to those who have rights. KP3R performs several matters concerning LMK's duties. Where KP3R's role and function in managing the Copyright and Related Rights license for the use of music recording songs / works for commercial purposes is an alliance of LMK which has obtained operational permit which should be the role and function based on the Law mandate -The Copyright Act is implemented by LMK. So that problems arise related to the implementation of the role of the institution related to the collection of royalties.

Type of research conducted in this research is applied-normative legal research, namely legal research on the enforcement or implementation of normative law provisions in action on every legal event that is related to the process of collecting and distributing royalties by LMK. Type of research used in this research is descriptive. Primary data obtained directly from field observation through interview and secondary data through literature study.

Based on the results of research many home singing managers who do not know LMK. So many singing houses do not cooperate with LMK. In research the home parties sing more familiar with YKCI institutions, WAMI, RAI than KP3R (WAMI). Which KP3R is the executor of royalty collection mandated by LMK. The legal certainty regarding LMK and KP3R raises the dualism of legal entities authorized to withdraw royalties. In order to withdraw the royalty KP3R set the high tariff rate without doing the classification of the area so that raises objections for the house to sing. The reason is that the house singing (karaoke place) has not cooperated with LMK. Therefore, socialization related to LMK and KP3R as well as a review of tariffs established by KP3R is required, so that the implementation of roles in the collection and distribution of royalties for some singing houses can be effective and tangible.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai ragam budaya yang berpotensi untuk dikembangkan agar mampu menghasilkan karya seni dan sastra yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bermanfaat untuk orang lain. Manusia normal memiliki daya pikir, kemampuan intelektual atau kemampuan otak, meskipun kemampuan intelektual tersebut tidak sama. Disamping dibawa sejak lahir dan sudah berbeda, kemampuan intelektual manusia tersebut juga dapat dibentuk dan ditingkatkan berdasarkan pendidikan dan latihan. Kemampuan intelektual manusia di bidang tertentu diarahkan pada suatu kegiatan intelektual untuk menghasilkan dan memperoleh sesuatu yang disebut karya atau temuan (invensi). Karya intelektual semacam itu terdapat di berbagai bidang, misalnya ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Kreativitas manusia ini sudah selayaknya diberikan perlindungan oleh pemerintah agar orang yang menciptakan karya tersebut merasa dihargai atas hasil karya ciptaannya sehingga memacu untuk berkreativitas yang lebih berkualitas.

Keberadaan Undang-Undang Hak Cipta bertujuan untuk melindungi hak-hak bagi mereka yang telah menghasilkan karya yang berasal dari pengungkapan ekspresi yang dikembangkan dengan kemampuan intelektualitasnya. Karya cipta salah satunya dalam bentuk karya cipta lagu. Karya cipta lagu merupakan karya yang hadir dan dapat dirasakan sebagai kebutuhan yang bersifat immaterial atau non fisik. Lagu merupakan sebuah karya cipta manusia yang penciptanya berhak untuk mendapatkan manfaat atas hasil ciptaannya, khususnya manfaat ekonomi. Hak ekonomi ini didapatkan oleh Pencipta dari pihak lain yang menggunakan ciptaannya dengan sah yang memberikan royalti.

Pendapat Adami Chazawi, titik tolak nilai yang dilindungi oleh HKI adalah proses berpikir penciptanya atau inventornya maka hak kebendaan yang melekat pada proses intelektual tersebut termasuk benda yang tidak berwujud¹. Hak tersebut berupa hak untuk mempertahankan hasil karya miliknya dan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hasil karya tersebut, misalnya untuk mendapatkan penghargaan secara ekonomis.

Hak cipta terdiri dari dua kata, yaitu hak dan cipta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya). Definisi yang di berikan oleh Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan sebagai berikut “Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya

¹Adami Chazawi, 2007, Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL), Bayumedia Publishing, Malang

atau memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²

Menurut Richard Burton Simatupang bahwa Hak Cipta adalah hak khusus yang oleh pemerintah diberikan kepada seseorang yang telah menciptakan sesuatu berdasarkan pemikiran atau keahliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.³ Sedangkan cipta adalah kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru, atau dapat pula diartikan sebagai angan-angan yang kreatif.

Pemilik hak cipta dalam mempertahankan haknya seringkali mengalami sedikit kendala untuk menangani pelanggaran ini dalam mempertahankan hak mereka. Maka Badan Hukum nirlaba untuk hak cipta yang sudah dikenal sebelum Undang-Undang Hak Cipta 2014 antara lain, Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), dan lain-lainnya. Lembaga hukum tersebut di atas dibentuk atas dasar prakarsa subjek hukum perdata atau didirikan oleh pihak swasta, yaitu mereka yang ingin membantu para pencipta dalam mengumpulkan hak-haknya berupa royalti atas penggunaan karya cipta mereka berupa lagu atau musik. Sejarah pembentukan LMK itu sendiri sudah dimulai sejak sebelum diundangkannya Undang-Undang Hak Cipta 2014, yaitu melalui pembicaraan beberapa LMK dan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, PAPPRI, dan sebagainya. Dalam perkembangannya undang-undang hak cipta yang baru mengatur tentang Lembaga Manajemen Kolektif. Dimana lembaga ini yang menjadi penghubung antara pencipta dengan para pihak yang menggunakan ciptaan. Hal ini juga tidak terlepas dari tugas dan fungsi dari lembaga ini yang akan mengelola hak ekonomi dari pencipta. Lembaga Manajemen Kolektif melaksanakan tugasnya terhadap para Pencipta yang telah mendaftarkan diri/bergabung dengan lembaga tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif ini merupakan solusi dari Undang-Undang Hak Cipta terhadap pencipta yang mengalami kendala dalam pengurusan/pengelolaan hak ekonomi yang diterima pencipta dari ciptaannya, hal ini merupakan pilihan dan bukan paksaan.

Lembaga Manajemen Kolektif yang sekarang sudah ada diantaranya adalah YKCI, WAMI dan RAI serta bagi Hak Terkait terdapat PAPPRI, ARDI, SELMI dan ARMINDO yang secara Legal sudah mendapatkan ijin operasional dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2016 dan mewakili kepentingan pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemilik hak terkait.

Lembaga Manajemen Kolektif merupakan kepanjangan tangan dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait untuk menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, sehingga mereka mendapatkan pemanfaatan ekonomi terhadap karya cipta mereka yang digunakan dan

²Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³ Simatupang, Richard Burton, 2007, Aspek Hukum dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta.

dimanfaatkan secara komersil. Dengan demikian tugas Lembaga Manajemen Kolektif terdiri dari :

- a. Menyusun kode etik LMK dibidang lagu dan/atau musik;
- b. Melakukan pengawasan terhadap LMK di bidang lagu dan/atau musik;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengurus LMK;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada dibawah koordinasinya;
- e. Menetapkan sistem dan tata cara perhitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK;
- f. Menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk pencipta, pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait;
- g. Melakukan mediasi atas sengketa Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- h. Memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.

Ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Hak Cipta 2014 yang menyinggung tentang LMK nasional menegaskan bahwa ada 2 jenis LMKn, yaitu: (a) LMKn yang mengemban kepentingan pencipta, dan (b) LMKn yang mengemban kepentingan pemilik hak terkait. Pasal 89 ayat (2) UNDANG-UNDANG HAK CIPTA 2014 terdapat ketentuan yang memberi wewenang juga kepada LMK nasional untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau disebut LMKn membentuk sebuah lembaga Koordinator Pelaksanaan Penarikan dan Pendistribusian Royalti disebut KP3R dimana tugasnya sesuai namanya menarik, menghimpun dan memberikan hak kepada yang mempunyai hak. Dalam memberi kepastian hukum dan meningkatkan kecepatan dalam melakukan proses penagihan dilapangan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor : HKI 20T.03.01-01 Tahun 2016 tentang pengesahan petunjuk pelaksanaan penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti rumah bernanyi.

Alasan KP3R dibutuhkan dalam lisensi :

1. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir Indonesia mengalami kasus “multi LMK” dimana beberapa LMK saling menagih berdasarkan kuasa kepada pengguna komersial
2. Memberikan kepastian kepada pengguna komersial untuk berhubungan dengan wakil pemilik hak cipta dan produk hak terkait dalam rangka mengurus lisensi

3. Mengoptimalkan, efisiensi dan efektivitas dalam proses permohonan lisensi dan pengajuan lisensi.
4. Meningkatkan kecepatan dalam melakukan proses penagihan dilapangan.

KP3R melaksanakan beberapa hal mengenai tugas LMK. Dimana Peran dan fungsi KP3R dalam mengelola lisensi Hak Cipta dan Hak Terkait untuk penggunaan lagu/karya rekaman musik untuk keperluan komersial merupakan aliansi dari LMK yang telah mendapatkan izin operasional yang mana seharusnya peran dan fungsi tersebut berdasarkan amanat Undang-Undang Hak Cipta dilaksanakan oleh LMK.

Keberadaan Undang-Undang Hak Cipta 2014 yang memberikan perlindungan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait, diharapkan semua pihak yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait, harus benar-benar bisa konsisten untuk melaksanakan ketentuan yang sudah diatur didalam Undang-Undang Hak Cipta 2014. Sebab dengan dipatuhinya Undang-Undang Hak Cipta 2014 maka diharapkan Pencipta dan pemilik hak terkait bisa mendapatkan hak-haknya sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada mereka dan sekaligus meningkatkan kreatifitas untuk menciptakan dan memproduksi lagu atau musik. Dan selain itu juga keberadaan LMK dan LMKN akan menjadi instrumen penting sebagai institusi pendukung ekonomi kreatif sebagai salah satu unggulan ekonomi nasional.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa dasar hukum berlakunya Lembaga Manajemen Kolektif secara nyata belum dirasakan masyarakat, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai Pengelola Royalti serta hak ekonomi lain bagi pencipta dari Pengguna Hak Cipta, khususnya di Kota Pontianak. Selain itu Keberadaan LMK sebagai lembaga pengumpul royalti sesuai dengan amanat Undang-Undang Hak Cipta 2014 terbaru sangat menarik terkait pemungutan royalti secara nyata dilakukan oleh KP3R, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum LMK sebagai lembaga pengumpul royalti.

Metode penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis,

dan konsisten. Analisa dapat dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁴

Tujuan dari penelitian diantaranya mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah dan dapat merumuskan hipotesa, untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik suatu keadaan dan perilaku, memperoleh data mengenai hubungan gejala dengan gejala lainnya, dan dapat menguji hipotesa yang berhubungan dengan sebab-akibat.

A. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-terapan, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Peristiwa hukum yang dimaksud yaitu terkait keberlakuan Undang-Undang Hak Cipta terhadap proses pengumpulan serta pendistribusian royalti oleh LMK.
2. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Tipe deskriptif bertujuan untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada Undang-Undang, naskah kontrak atau objek kajian lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan, menggambarkan, dan menganalisis mengenai kedudukan hukum, wewenang serta bentuk tanggung jawab Lembaga Manajemen Kolektif.

B. Sumber Data dan Jenis Data

- a. Data Primer Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan melalui wawancara
- b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan cara kepustakaan/studi pustaka dengan jalan mengumpulkan data seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif yang memuat ketentuan tentang HKI, hak cipta, hukum perjanjian dan jurnal ilmiah dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

(a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

⁴ Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

- (b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; dan
 - (c) Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa penelusuran internet, jurnal surat kabar, dan makalah.
 - 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian hukum, mengutip peraturan perundang-undangan dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dibahas.

b. Studi Wawancara

Studi wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data, yang dilakukan dengan dialog secara lisan baik maupun langsung maupun tidak langsung. Studi wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu Pencipta. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dalam penelitian mengenai peranan LMK dalam mewujudkan hak ekonomi pencipta.

- c. Lokasi Wawancara Untuk menunjang penelitian penulis maka penulis melakukan wawancara terhadap para pencipta, *user* di Kkota Pontianak, dan di Kantor Wilayah Kemenkumham Kal-Bar.

D. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah melalui cara pengolahan data dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka dan dokumen sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

b. Rekonstruksi data Menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

c. Sistematika Data Menyusun atau menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan melakukan penafsiran terhadap data dari studi pustaka dan hasil wawancara. Kemudian dirumuskan kembali untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu (Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Hak Cipta). Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum⁵. Sebagai imbalan atas penggunaan hasil karya cipta tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta yang memberi izin memperoleh pembayaran yang disebut dengan royalti dalam kurun waktu tertentu⁶.

Kota Pontianak terdapat usaha rumah bernyanyi (tempat Karaoke) yang dapat di kategorikan Karaoke Keluarga seperti : Happy Puppy, Karaoke Diamond, XP Karaoke, NAV, winone, cafe the Tha, Studio karaoke dan sebagainya. Hal ini menggambarkan budaya masyarakat kota Pontianak sangat tertarik terhadap hiburan karaoke. Dilihat situasi sosial di tempat hiburan karaoke, dan manfaat yang diperoleh dengan karaoke terutama masyarakat perkotaan dapat dilihat dari

⁵Gunawan Widjaja, 2001, Seri Hukum Bisnis Lisensi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal.23

⁶Chairul Anwar, 1999, Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-Undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, h.25

gaya hidup masyarakat perkotaan merasa dengan karaoke mereka memperoleh kepuasan dan kesenangan yang mampu menghilangkan beban pikiran yang mereka rasakan.

Dewasa ini, dunia bisnis mengalami persaingan yang semakin ketat termasuk didalamnya bisnis karaoke yang diimbangi dengan perkembangan alat-alat teknologi yang semakin canggih sehingga mempermudah setiap perusahaan untuk meningkatkan kinerja usahanya guna mencapai tujuannya yaitu mendapatkan laba yang semaksimal mungkin dengan pengorbanan seminimal mungkin. Berkembangnya dunia hiburan karaoke yang sudah tak terbendung lagi ikut mewarnai hingar bingarnya susana kehidupan kota dan sekarang sudah merambah ke kota kecil.

Karaoke di Indonesia yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan, minum dan pelayanan lainnya.

Salah satu bidang usaha yang dikembangkan dalam sektor pariwisata adalah industri jasa hiburan umum. Sebagai bidang usaha yang termasuk dalam sektor pariwisata, industri jasa hiburan umum adalah salah satu bidang usaha yang dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang tergolong berpenghasilan menengah ke atas. Sektor ini mempunyai keterkaitan cukup luas sehingga cukup banyak menyerap tenaga kerja dan mendukung upaya meningkatkan pendapatan daerah, serta berfungsi sebagai daya tarik wisata.

Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat kategori karaoke yaitu Karaoke Hall, Karaoke Keluarga, Karaoke Eksekutif. Terkait aturan tarif royalti maka diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2-OT.03.01-03. Dan hal ini berhubungan dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang bertugas mengenai penghimpunan royalti yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Untuk melihat bagaimana perkembangan pengetahuan dan pemahaman tentang Undang-Undang Hak Cipta 2014 pihak rumah bernyanyi atau tempat Karaoke di Kota Pontianak, maka dilakukan beberapa penelitian yang hasilnya berupa Persentasi Rumah bernyanyi atau tempat Karaoke telah mengenal Lembaga Manajemen Kolektif yang berwenang sebagai pemungut royalti terhadap pengguna Hak Cipta, namun terdapat pula kekurangan pengetahuan oleh pihak tempat Karaoke mengenai LMK. Berdasarkan pernyataan penanggungjawab tempat Karaoke melakukan lisensi terkait dalam pemungutan royalti mereka berhubungan dengan YKCI (keterangan dari supervisor NAV) yang mereka sendiri tidak mengetahui bahwa YKCI adalah salah satu LMK yang telah memperoleh izin sebagai pemungut royalti⁷. Ketidaktahuan bahwa YKCI, WAMI dan lainnya secara hukum dalam Undang-Undang Hak Cipta dikenal dengan LMK menggambarkan bahwa pihak Rumah bernyanyi atau tempat

⁷Berdasarkan wawancara dari penanggungjawab Karaoke Nav, 8 Juni 2017, di Kantor Karaoke Nav

Karaoke di Kota Pontianak tidak begitu paham dan belum mengerti dalam mengikuti aturan perlindungan hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Hak Cipta 2014. Berdasarkan hal ini menurut pendapat peneliti terkait pemahaman mengenai LMK yang belum begitu dinilai baik juga membuat fungsi dan tugas LMK tidak mereka pahami dengan benar.

Terkait pembayaran royalti pihak Rumah bernyanyi Nav menyatakan telah memiliki lisensi dengan YKCI dimana seluruh perjanjian dibuat di pusat kantor NAV Jakarta dengan diikuti langsung oleh cabang-cabang di wilayah lain. Berdasarkan keterangan tersebut maka Nav mengaku telah bekerjasama dengan LMK dalam pengelolaan royalti. Dimana yang hampir serupa dinyatakan oleh penanggung jawab karaoke Diamond (Hotel KINI) yang telah bekerjasama dengan salah satu LMK. Namun keterangan yang berbeda di peroleh dari Karaoke yang menyatakan belum bekerjasama dengan LMK dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara lanjut yang dilakukan peneliti terhadap para *user* Kota Pontianak (tempat Karaoke) terdapat kebingungan dan kurangnya pemahaman dengan baik terkait pengaturan dalam pelaksanaan pembayaran royalti yang seharusnya merupakan kewajiban *user* untuk memenuhinya. Hal ini dikarenakan adanya dualisme badan atau organisasi yang melakukan pemungutan royalti yaitu LMK (YKCI, WAMI, RAI) dan KP3R (WAMI). Yang mana tempat XP Family karaoke menyatakan belum bekerjasama dengan Sentral Lisensi Musik Indonesia dan juga baru akan bergabung dengan KP3R jika dirasakan baik dan berguna, serta belum mengetahui peran KP3R dalam melaksanakan tugas LMK terkait pemungutan royalti untuk melindungi para pihak terkait. Hal yang hampir serupa dinyatakan oleh pemilik karaoke WinOne yang mengatakan merasa belum memperoleh kepastian hukum yang jelas terkait KP3R sehingga belum mau bergabung dengan LMK maupun KP3R.

Berpedoman dari aturan Undang-Undang Hak Cipta 2014 diatas dilakukan penelitian terhadap pihak rumah karaoke terkait pembayaran royalti yang sejauh ini ditentukan oleh pihak KP3R. Dimana pada dasarnya *User* (Tempat Karaoke) bersedia melakukan pembayaran royalti namun *user* mengajukan peninjauan kembali kepada KP3R dalam hal pengadaaan tarif Rp.15.000.000/room (lima belas juta rupiah) setiap tahunnya dengan alasan harga tersebut sangat sulit untuk dipenuhi *user* mengingat tempat usaha didaerah khususnya Kota Pontianak yang tidak dapat disamakan dengan *user* didaerah lain karena tiap *user* memiliki tingkat konsumen yang berbeda⁸. Oleh karena itu pengenaan tarif royalti harus disesuaikan dengan kondisi keadaan *user* (tempat Karaoke) sehingga ada penggolongannya.

Belum begitu paham mengenai Lembaga Managemen Kolektif, para pengguna hak cipta khususnya pengguna hak cipta musik sudah harus memahami mengenai Koordinator Pelaksana Penarikan dan Penghimpunan Royalti (KP3R) yang merupakan pelaksana pemungutan royalti menurut Keputusan Menteri Hukum dan Ham. Hal ini juga yang menjadi lambat dan kurangnya mengerti

⁸Berdasarkan wawancara dari penanggungjawab Karaoke Diamond, 12 Juni 2017, di Kantor Hotel Kini

masyarakat akan maksud dari perlindungan yang ada dalam Undang-undang Hak Cipta terkait LMK. Terlihat dari jawaban para pihak karaoke yang mengenal satu LMK namun tidak mengenal KP3R, dimana keterangan penanggung jawab karaoke NAV mengatakan telah bergabung dengan YKCI dan melakukan royalti melalui YKCI. Selain itu pengakuan dari salah satu tempat Karaoke menyatakan pembayaran royalti yang selama ini dilakukan terkadang terjadi beberapa kali pemungut royalti sehingga menimbulkan pemungutan yang berulang, pernyataan ini diungkapkan oleh pemilik tempat Karaoke WINONE sehingga pemilik kurang tertarik mengikuti prosedur yang ditawarkan baik terkait LMK maupun KP3R⁹. Hal tersebut juga mengakibatkan pihak yang turut dirugikan termasuk pencipta atau pemegang izin, perkembangan seni dan sastra, karena pencipta tidak bergairah meningkatkan hasil karyanya.

Keterangan yang hampir sama diperoleh dari karaoke WinOne dimana menyatakan kalau kepastian hukum pemungutan royalti tidaklah jelas terkait pengakuannya memberikan royalti dengan beberapa pihak yang datang. Persepsi yang salah terhadap peraturan akan berdampak kurang baik dan tidak sedikit mengganggu sebagai beban dan merugikan usaha.

Bila berbicara efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Di Kota Pontianak terlihat kurang cepatnya kemajuan mengenai perubahan hukum yang ada secara langsung dapat dilihat dari usaha termpat-tempat Karaoke yang masih kurang jelas dalam pengumpulan royalti. Hal ini terkait pernyataan lima tempat Karaoke yang masih menunggu proses yang pasti mengenai pemungutan royalti sambil mempelajari aturan yang ditetapkan. Karena baik penetapan siapa yang melakukan pemungutan dan jumlah besarnya royalti masih membuat para penanggung jawab karaoke di Kota Pontianak belum merasakan Kepastian Hukum, sehingga efektifitas hukum nya bagi Masyarakat Kota Pontianak lemah.

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa rumah bernyanyi (tempat Karaoke) di Kota Pontianak sudah ada yang berkerjasama dengan Lembaga Manajemen Kolektif karena berdasarkan lisensi kantor pusat rumah bernyanyi telah bekerjasama langsung dengan LMK serta mengetahui pentingnya bergabung dengan Lembaga ini, tetapi terdapat juga beberapa rumah bernyanyi (tempat Karaoke) yang belum mengenal dan bekerjasama dengan Lembaga Manajemen Kolektif seperti diundangkan dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014 dengan alasan bahwa kepastian aturan hukum mengenai LMK dan KP3R masih menimbulkan dualisme badan hukum yang berwenang melakukan penarikan royalti serta jumlah penetapan royalti yang dirasa tinggi menjadi

⁹Berdasarkan wawancara dari penanggungjawab Karaoke WinOne, 12 Juni 2017, di Kantor karaoke Winone

alasan belum bekerjasamanya rumah bernyanyi(tempat Karaoke) dengan LMK.

2. Karena rumah bernyanyi (tempat Karaoke) masih belum semua bekerjasama dengan LMK dengan alasannya belum jelasnya kepastian hukum dimana LMK dan KP3R dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014 masih menimbulkan dualisme badan hukum yang berwenang melakukan penarikan royalti. Ketetapan yang bertugas memungut royalti berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta adalah LMK namun dibentuk lagi KP3R untuk menari royalti menimbulkan kelemahan hukum. Selain alasan tersebut rumah bernyanyi (tempat Karaoke) masih menunggu kepastian hukum terkait peninjauan kembali terhadap pengajuan keberatan tarif royalti yang ditetapkan KP3R senilai Rp. 15.000.000./room tiap tahunnya, sehingga beberapa rumah bernyanyi tidak melakukan kerjasama dengan Lembaga Manajemen Kolektif, maka terlihat saat ini bahwa belum semua rumah bernyanyi (tempat Karaoke) bekerjasama dengan Lembaga Manajemen Kolektif maka peran sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Hak Cipta belum terlaksana secara maksimal di Kota Pontianak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan oleh Penulis mengenai Undang-Undang Hak Cipta terkait dengan Lembaga Manajemen Kolektif antara lain :

1. Masih perlu dibangun kesinergian hukum yang mendukung sistem Hak Cipta nasional yang saling memperkuat dalam melindungi setiap hak-hak secara optimal, kepastian hukum merupakan sebuah kekuatan yang mampu menjaga perlindungan. serta diberi kemudahan dalam proses bekerjasama LMK agar para pihak rumah bernyanyi (tempat Karaoke) tidak keberatan dalam memenuhi syarat yang ditetapkan salah satunya terkait tarif royalti yang harusnya disesuaikan dengan kemampuan keberadaan wilayah rumah bernyanyi (tempat Karaoke).
2. Dari segi Undang-Undang Hak Cipta berkenaan pengaturan LMK harus lebih jelas dan tidak multitafsir serta tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku dimana fungsi, tugas dan tanggung jawab baik pemegang hak cipta maupun Lembaga Manajemen kolektif tidak simpang siur atau menimbulkan pemahaman yang berbeda dan kepastian hukum dapat benar-benar diperoleh mengenai KP3R sehingga keberadaan KP3R sudah jelas jika dimasukkan dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagai dasar hukum utama terkait Hak Kekayaan Intelektual.
3. Dari penegakan hukum harus terus mengawasi pelaksanaan regulasi hukum yang bersangkutan serta memberlakukan sanksi sehingga hukum dapat berfungsi optimal dalam penerapannya.

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, 2007, Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL), Bayumedia Publishing, Malang
- Simatupang, Richard Burton, 2007, Aspek Hukum dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2001, Seri Hukum Bisnis Lisensi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Chairul Anwar, 1999, Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-Undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.